

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah maka otonomi daerah telah dapat dilaksanakan secara penuh pada daerah kabupaten dan daerah kota. Sehubungan dengan hal tersebut maka peran keuangan daerah akan semakin penting karena daerah dituntut untuk dapat lebih aktif lagi dalam menggali sumber dananya sendiri dan mengelola dana yang diterima dari pemerintah pusat secara efisien.

Tanggungjawab dan tugas yang diemban pemerintah daerah menjadi semakin berat karena semakin banyaknya urusan yang ditangani yang tentu saja membutuhkan dana yang banyak. Daerah semakin dituntut untuk memenuhi kebutuhan keuangan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Masalah keuangan ini adalah masalah umum yang dialami oleh seluruh daerah di Indonesia. Besar kecilnya penerimaan daerah akan sangat mempengaruhi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat. Semakin besar penerimaan daerah, maka semakin kecil tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat demikian juga sebaliknya sehingga mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Indikator keberhasilan daerah dalam menjalankan pembangunan adalah aspek keuangan. Pembinaan yang dilakukan pemerintah terhadap

berbagai unsur keuangan harus dijalankan agar besarnya Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber bagi pendanaan pembangunan daerah agar dapat dimaksimalkan (Aprianto, 2005).

Kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri adalah kemampuan untuk *self supporting* dalam bidang keuangan (Kaho,1995). Daerah otonomi tersebut memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber daya keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri serta cukup untuk memadai membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Pemerintah daerah dituntut untuk menciptakan kemandirian yang dapat memacu pertumbuhan daerah. Daerah harus memiliki kemampuan keuangan yang meyakinkan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan sedapat mungkin dibiayai dengan penerimaan daerah dengan PAD sebagai bagian terbesarnya, sehingga ketergantungan pada pemerintah pusat dapat diminimalkan. Sehingga daerah dalam proses pelaksanaannya dalam menggali potensi pendapatan daerah secara mandiri diperlukan suatu proses pengendalian internal yang efektif.

Sistem pengendalian internal yang efektif dalam pemerintah daerah tersebut dapat mendorong daerah menciptakan kemandirian daerah dalam upaya menggali potensi sumber pendapatan daerah. Karena dengan pengendalian internal yang efektif, daerah akan dapat meminimalkan bentuk kebocoran yang dapat terjadi dalam setiap program dan kegiatan pemerintah

daerah dalam upaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah, baik berupa pajak daerah atau retribusi daerah.

Keefektifan Sistem pengendalian Internal adalah merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi, metode dan alat-alat yang dikoordinasikan untuk digunakan di dalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan (Aprianto, 2005)

Kecurangan atau kebocoran akan dapat terjadi jika ada kesempatan dimana seseorang memiliki akses terhadap asset atau memiliki wewenang untuk mengatur prosedur pengendalian yang memperkenankan dilakukannya suatu skema kecurangan. Jabatan, tanggung jawab, maupun otorisasi memberikan peluang untuk dapat terjadinya suatu kecurangan. Untuk meminimalisir peluang atau kesempatan seseorang dalam melakukan suatu kecurangan atau memperkecil celah kebocoran maka diperlukan pengendalian internal yang efektif (Suprajadi dalam Najahningrum, 2013).

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang dapat diharapkan menjadi salah satu pendapatan daerah. Sumbangan dari sektor pariwisata untuk memperbesar PAD tersebut memerlukan suatu program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah. Salah satu daerah yang giat mengembangkan potensi wilayahnya untuk tujuan wisata dan menarik minat wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara untuk berkunjung adalah Kabupaten Bantul. Obyek dan daya tarik wisata yang dimiliki Kabupaten Bantul cukup banyak dan bervariasi,

antara lain: obyek wisata laut, argowisata, budaya, sejarah, dan lain sebagainya.

Wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata di Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Kabupaten Bantul sebagai bagian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan daerah tujuan wisata, memiliki sejumlah obyek dan daya tarik wisata. Obyek dan daya tarik wisata tersebut antara lain: Pantai Parangtritis, Pantai Pandansimo, Pantai Samas, Goa Selarong, Goa Cerme, serta makam Raja-Raja Imogiri.

Tabel 1.1

Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015

| Obyek Wisata | Tahun 2011 | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Pantai Parangtritis | 1.325.853 | 1.783.179 | 1.693.340 | 1.879.000 | 1.999.870 |
| Pantai Samas | 36.256 | 51.900 | 59.620 | 60.650 | 140.850 |
| Gua Selarong | 27.473 | 27.974 | 30.711 | 36.731 | 39.925 |
| Gua Cerme | 17.209 | 20.032 | 15.505 | 13.756 | 13.455 |
| Makan Imogiri | 23.296 | 31.230 | 31.230 | 7.637 | 9.810 |
| Pantai Pandansimo | 54.290 | 129.848 | 129.005 | 141.573 | 163.169 |
| Pantai Kwaru | 268.435 | 259.513 | 145.842 | 77.732 | 67.585 |
| Pantai Goa Cemara | 10.901 | 84.133 | 79.331 | 88.909 | 95.260 |

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Menurut data tabel diatas pantai parangtritis menjadi salah satu obyek pariwisata yang memiliki jumlah kunjungan wisatawan paling banyak sehingga memiliki potensi untuk dapat mendatangkan pemasukan retribusi yang paling besar dibandingkan obyek-obyek wisata yang lain di Kabupaten Bantul.

Potensi yang besar tersebut menjadikan Pantai Parangtritis sebagai tumpuan Kabupaten Bantul dalam memperoleh pendapatan retribusi masuk obyek wisata yang cukup besar. Namun dibalik besarnya tingkat kunjungan dan potensi pendapatan retribusi masuk obyek wisata Pantai Parangtritis, tentu memiliki celah-celah yang dapat menimbulkan kebocoran yang terjadi dari proses penarikan retribusi obyek wisata. Kebocoran tersebut dapat timbul dari faktor internal pemerintah daerah dalam hal ini adalah petugas pelaksana memungutan retribusi obyek wisata dan kebocoran dapat timbul dari faktor eksternal yang berasal dari lingkungan masyarakat sekitar obyek wisata.

Aspek kebocoran yang berasal dari internal pemerintahan tersebut dapat disebabkan oleh tidak berjalannya suatu sistem pelaksanaan yang sesuai dengan standar operasional prosedur atau petunjuk teknik pelaksanaan. Sehingga peran pengendalian internal dalam mengawasi serta mengevaluasi kinerja pelaksanaan di lapangan sangat penting dilakukan agar dapat mengoptimalkan potensi pemasukan daerah dari retribusi obyek wisata.

Aspek kebocoran lain yang dapat timbul adalah berasal dari eksternal pemerintahan atau dalam hal ini berasal dari kondisi lingkungan sosial masyarakat sekitar obyek wisata. Kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar obyek wisata memang sangat berpengaruh dalam tingkat ketertarikan wisatawan dalam berkunjung ke obyek pariwisata. Sehingga pengendalian serta penataan kondisi lingkungan sosial masyarakat sekitar obyek wisata menjadi hal penting dalam upaya untuk meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka judul penelitian ini adalah

“Sistem Pengendalian Internal Dalam Upaya Optimalisasi Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Bantul”

2. Batasan Masalah

Penelitian ini akan meninjau tentang tingkat efektivitas, optimalisasi dan tingkat kebocoran dalam pelaksanaan sistem retribusi obyek wisata yang selama ini telah dilaksanakan menurut perpektif stakeholders. Batasan penelitian ini yaitu ruang lingkup penelitian fokus terhadap retribusi obyek wisata Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektifitas sistem pengendalian internal pada retribusi obyek wisata obyek wisata Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul ?
2. Bagaimana bentuk kebocoran pada sistem retribusi obyek wisata Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul?
3. Bagaimana upaya meningkatkan sistem pengendalian internal pada sistem retribusi obyek wisata Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul?

4. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui efektifitas sistem pengendalian internal pada retribusi obyek wisata Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul.
- b. Untuk mengetahui bentuk kebocoran pada sistem retribusi obyek wisata Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul.

c. Untuk mengetahui upaya meningkatkan sistem pengendalian internal pada sistem retribusi obyek wisata Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul.

5. Manfaat Penelitian

a. Bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan bahan evaluasi kepada pemerintah daerah terhadap sistem retribusi obyek wisata agar dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor retribusi obyek wisata Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul.

b. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi yang berguna sebagai referensi bagi masyarakat agar dapat turut serta dalam proses pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi daerahnya.

c. Bagi Peneliti

Selanjutnya Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat menjadi karya ilmiah yang berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya.